

EFEKTIVITAS PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MADRASAH DI KANWIL KEMENAG JAWA TIMUR

¹Nurindah Putri Fatimiah, ²Sahudi

^{1,2} Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: nurindahputri2412@email.com, sahudiuinsa@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of educational quality mapping based on the National Education Standards (SNP) in improving madrasah quality within the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs (Kanwil Kemenag) of East Java. The research was driven by the observable gap between normative quality mapping procedures and their actual impact on madrasah improvement. Using a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation involving madrasah principals, supervisors, and Kanwil Kemenag officials. The findings indicate that quality mapping in madrasahs has been implemented through the Education Quality Assurance System (SPMP) mechanism; however, its implementation remains uneven and incomplete. Five main obstacles were identified: limited human resource capacity, low leadership awareness, data validity issues, minimal follow-up actions, and technology access gaps between public and private madrasahs. The effectiveness analysis reveals that madrasahs which actively follow up on quality mapping results demonstrate significantly greater SNP achievement than those treating mapping as mere administrative compliance. This research concludes that the effectiveness of quality mapping is highly conditional and depends on leadership commitment, supervisor support, and a genuine quality culture within the madrasah.

Keywords: Quality Mapping, National Education Standards, Madrasah Quality

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas pemetaan mutu pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam upaya meningkatkan kualitas madrasah di lingkup Kanwil Kemenag Jawa Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang ditemukan antara prosedur pemetaan mutu secara normatif dengan dampak nyatanya terhadap perkembangan kualitas madrasah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, pengawas, serta pejabat Kanwil Kemenag. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemetaan mutu di madrasah telah berjalan melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), namun implementasinya masih belum merata. Lima kendala utama berhasil diidentifikasi, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pimpinan, persoalan validitas data, minimnya tindak lanjut hasil pemetaan, serta kesenjangan akses teknologi antara madrasah negeri dan swasta. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa madrasah yang secara aktif menindaklanjuti hasil pemetaan mutu memperlihatkan peningkatan capaian SNP yang jauh lebih signifikan dibandingkan madrasah yang memperlakukan pemetaan sebatas kepatuhan administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemetaan mutu bersifat kondisional dan sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan, dukungan pengawas, dan budaya mutu yang tumbuh secara autentik di madrasah.

Kata Kunci: Pemetaan Mutu, Standar Nasional Pendidikan, Kualitas Madrasah

PENDAHULUAN

Upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional telah melahirkan berbagai instrumen kebijakan yang salah satunya adalah pemetaan mutu pendidikan. Instrumen ini dirancang untuk mengukur posisi setiap satuan pendidikan terhadap delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian (PP No. 2005). Penetapan kedelapan standar tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang selanjutnya diperbarui beberapa kali menegaskan bahwa negara memiliki komitmen untuk menetapkan kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan di wilayah hukum Indonesia.

Madrasah sebagai satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama mempunyai posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Sejak Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 memberikan pengakuan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum (UUD RI No. 20, 2003), tuntutan pemenuhan SNP pun berlaku setara tanpa pengecualian. Namun kondisi lapangan menunjukkan realita yang berbeda, di mana banyak madrasah, khususnya yang berstatus swasta, masih menghadapi keterbatasan substansial dalam memenuhi keseluruhan komponen standar tersebut. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan mendasar tentang bagaimana negara memastikan setiap anak yang belajar di madrasah mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Berbagai studi terdahulu telah membahas implementasi sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan, namun sebagian besar terfokus pada dimensi teknis pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan atau pada proses akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal (Suardipa, 2020). Kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pemetaan mutu sebagai instrumen strategis dalam konteks madrasah di lingkup Kanwil Kemenag provinsi masih sangat terbatas. Celah inilah yang membuat penelitian ini perlu dilakukan sebagai kontribusi yang melengkapi literatur yang sudah ada.

Kanwil Kemenag Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah madrasah terbesar secara nasional. Fakta ini menjadikan wilayah tersebut sebagai konteks yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana pemetaan mutu berjalan di lapangan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan apakah mekanisme yang ada sudah cukup efektif mendorong peningkatan kualitas madrasah secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemetaan mutu di madrasah, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui, sekaligus menganalisis efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas madrasah. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan pembinaan madrasah yang lebih tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2021) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu maupun kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena pemetaan mutu di madrasah tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui angka-angka statistik, melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap proses, konteks, dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena yang ada sesuai kondisi alamiahnya tanpa melakukan rekayasa terhadap objek yang diteliti (Rusandi, 2021). Rusandi dan Rusli menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya, yang kemudian dimaknai secara interpretatif oleh peneliti. Pendekatan ini selaras dengan tujuan penelitian yang ingin memotret secara utuh bagaimana pemetaan mutu dijalankan, tantangan apa yang dihadapi, dan dampak apa yang dihasilkannya.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Timur, mencakup beberapa madrasah yang telah menjalani siklus pemetaan mutu dalam tiga tahun terakhir. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebagaimana dianjurkan oleh Creswell (Creswell, 2015), yaitu menentukan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari pejabat bidang pendidikan madrasah di Kanwil Kemenag, pengawas madrasah, serta kepala madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas bagi peneliti menggali informasi lebih jauh sesuai perkembangan jawaban informan. Moleong (2017) menegaskan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata lisan maupun tertulis yang dicermati peneliti secara mendalam untuk menangkap maknanya secara utuh. Observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan pemetaan dan rapat pembahasan hasil peta mutu, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menganalisis rapor mutu, rencana pemenuhan mutu, dan dokumen kebijakan terkait.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di madrasah dalam lingkup Kanwil Kemenag Jawa Timur secara formal dijalankan melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berpijak pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016. Secara prosedural, proses pemetaan berlangsung dalam empat tahap yang berurutan: sosialisasi instrumen kepada operator dan kepala madrasah, pengisian instrumen secara mandiri oleh satuan pendidikan melalui aplikasi daring, verifikasi dan validasi oleh pengawas bersama staf kemenag kabupaten/kota, serta penerbitan rapor mutu yang menjadi umpan balik bagi madrasah.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat variasi kualitas yang sangat mencolok dalam pelaksanaan pemetaan antar kabupaten/kota. Daerah dengan jumlah pengawas yang memadai dan berkompetensi tinggi menunjukkan kualitas pemetaan yang lebih baik. Di sisi lain, madrasah-madrasah swasta di wilayah terpencil masih banyak yang menjalankan pemetaan secara formalitas administratif belaka tanpa memahami tujuan substantifnya (Rohmayanti, 2020). Rohmayanti menemukan bahwa instrumen pemetaan masih perlu disesuaikan dengan indikator SNP secara lebih operasional agar menghasilkan data yang lebih akurat dan representatif.

Lima kendala utama berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat satuan pendidikan, khususnya operator data dan staf administrasi madrasah swasta yang belum cukup terlatih. Kedua, rendahnya pemahaman dan komitmen kepala madrasah terhadap nilai strategis pemetaan mutu sebagai instrumen manajemen. Ketiga, persoalan validitas data akibat kecenderungan madrasah melaporkan kondisi yang lebih baik dari kenyataan untuk menghindari penilaian institusional yang buruk. Keempat, minimnya tindak lanjut dari hasil pemetaan karena keterbatasan anggaran dan kurangnya pendampingan teknis pengawas. Kelima, kesenjangan akses teknologi antara madrasah negeri di perkotaan dengan madrasah swasta di pedesaan yang menghambat pengisian instrumen secara daring.

PEMBAHASAN

Temuan tentang variasi kualitas pelaksanaan pemetaan mutu mencerminkan ketidakmerataan kapasitas kelembagaan yang terjadi antar daerah di Jawa Timur. Kondisi ini sejalan dengan argumentasi Suardipa dan Pitriani bahwa efektivitas sistem penjaminan mutu sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang terlibat, mulai dari operator data hingga pengambil kebijakan di tingkat satuan pendidikan (Rozi, 2023). Tanpa kesiapan SDM yang memadai, instrumen pemetaan yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu menghasilkan data yang akurat dan bermakna bagi perencanaan peningkatan mutu.

Persoalan validitas data yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan tantangan struktural yang tidak mudah diselesaikan hanya melalui perbaikan teknis instrumen. Kecenderungan madrasah untuk melaporkan kondisi yang lebih ideal dari kenyataan dipengaruhi oleh tekanan terhadap penilaian

institusional dan kekhawatiran akan dampak negatif dari rapor mutu yang rendah. Pola ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dalam cara memandang fungsi pemetaan mutu, yakni dari mekanisme penilaian yang menghasilkan konsekuensi sanksi menuju instrumen diagnosa yang bersifat formatif dan konstruktif. Rozi et al. (2023) menegaskan bahwa peta mutu yang akurat merupakan prasyarat utama bagi perencanaan peningkatan mutu madrasah yang tepat sasaran.

Kendala minimnya tindak lanjut dari hasil pemetaan menjadi temuan yang paling krusial dalam penelitian ini. Persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan anggaran, tetapi juga oleh kurangnya kapasitas madrasah dalam menerjemahkan data rapor mutu menjadi program perbaikan yang konkret dan terukur (Hidayatuloh, 2022). Hidayatuloh menekankan bahwa rencana peningkatan mutu yang efektif harus dilengkapi dengan kerangka waktu yang jelas, penanggungjawab yang teridentifikasi, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Tanpa komponen-komponen tersebut, dokumen rencana pemenuhan mutu hanya menjadi tumpukan kertas yang tidak memicu perubahan nyata di lapangan.

Dari perspektif kepemimpinan madrasah, penelitian ini mengkonfirmasi temuan Huda bahwa problematika madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam antara lain bersumber dari kurangnya komitmen kepemimpinan dalam menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten (K. Huda, 2016). Kepala madrasah yang memandang pemetaan mutu sebatas kewajiban pelaporan kepada atasan tidak akan mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasilnya. Sebaliknya, kepala madrasah yang memahami rapor mutu sebagai cerminan kondisi aktual lembaganya akan menjadikannya sebagai titik tolak bagi perencanaan pengembangan yang ambisius.

Analisis efektivitas dalam penelitian ini mengungkapkan pola yang konsisten: madrasah yang secara aktif dan jujur melaksanakan pemetaan serta menindaklanjutinya dengan program perbaikan yang terstruktur menunjukkan peningkatan capaian SNP yang lebih signifikan dibandingkan madrasah yang menjalankan pemetaan secara formalitas (B. Prasetya, 2022). Prasetya, Hadi, dan Sulaiman menemukan hal serupa dalam konteks SMK, di mana implementasi SPMI yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut secara sistematis terbukti berhasil meningkatkan mutu pendidikan secara terukur. Temuan lintas konteks ini memperkuat kesimpulan bahwa kunci efektivitas pemetaan mutu bukan terletak pada instrumen yang digunakan, melainkan pada kualitas siklus tindak lanjut yang mengikutinya.

Komponen SNP yang paling konsisten mengalami peningkatan setelah pemetaan mutu adalah standar proses dan standar penilaian. Hal ini terjadi karena perbaikan pada kedua standar tersebut relatif tidak membutuhkan investasi finansial yang besar, melainkan lebih pada perubahan praktik pembelajaran dan mekanisme evaluasi yang dapat dilakukan oleh guru dengan dukungan kepala madrasah (A. Prayoga, 2019). Sementara itu, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan tetap menjadi komponen yang paling sulit mengalami peningkatan signifikan dalam jangka pendek karena

sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah dan kemampuan finansial yayasan.

Dari dimensi manajemen pendidikan Islam, penelitian ini menemukan bahwa instrumen pemetaan yang mengacu pada SNP generik belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi kualitas yang bersifat khas madrasah, terutama aspek pembinaan karakter islami dan internalisasi nilai-nilai keagamaan (S. Samsinar, 2023). Samsinar dan Syamsuddin menegaskan bahwa implementasi manajemen mutu terpadu di madrasah harus mampu mewujudkan profil pelajar yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik. Dimensi ini merupakan keunggulan komparatif madrasah yang perlu dipertimbangkan secara lebih serius dalam pengembangan instrumen pemetaan mutu ke depannya.

Upaya transformasi digital yang sedang dikembangkan Kemenag, yaitu Rapor Kinerja Madrasah berbasis digital, membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses pemetaan mutu. Namun demikian, transformasi digital ini hanya akan efektif jika disertai dengan pembangunan kapasitas SDM yang memadai di seluruh jenjang, dari operator madrasah hingga staf kanwil. Tanpa komponen capacity building yang kuat, digitalisasi sistem pemetaan justru berpotensi memperbesar kesenjangan kualitas antara madrasah yang melek teknologi dengan madrasah yang tidak.

Tanjung, Harahap, dan Lubis (2022) menemukan bahwa efektivitas sistem penjaminan mutu internal terhadap kinerja organisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasional dan kejelasan mekanisme akuntabilitas. Temuan ini memiliki implikasi langsung bagi penelitian ini: agar pemetaan mutu betul-betul efektif mendorong peningkatan kualitas madrasah, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang jelas yang memastikan hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data, tetapi berlanjut menjadi tindakan perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

Muryadi mengingatkan bahwa model evaluasi program yang efektif harus menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, bukan sekadar mengumpulkan data untuk kepentingan pelaporan administratif (A.D. Muryadi, 2017). Prinsip ini sangat relevan bagi desain pemetaan mutu madrasah ke depan. Instrumen, mekanisme pengumpulan data, dan sistem pelaporan harus dirancang dengan orientasi pada penggunaan data, bukan pada kelengkapan administrasi. Ketika orientasi ini bergeser, pemetaan mutu akan bertransformasi dari beban birokratis menjadi alat manajemen yang benar-benar membantu madrasah berkembang.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pemetaan mutu sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara Kanwil Kemenag dengan madrasah di lapangan. Pengawas yang hadir bukan hanya sebagai auditor tetapi juga sebagai mitra profesional terbukti mampu mendorong madrasah untuk menindaklanjuti hasil pemetaan secara lebih serius. Astuti dan Diantoro (2021) menegaskan bahwa dukungan SDM yang kompeten merupakan faktor kunci dalam perencanaan dan implementasi penjaminan mutu yang efektif. Ini berarti investasi pada pengembangan

kompetensi pengawas madrasah harus dipandang sebagai investasi strategis dalam ekosistem peningkatan mutu madrasah secara keseluruhan.

Gunawan (2022) menegaskan pula bahwa peran sistem manajemen mutu dalam menciptakan madrasah yang unggul sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya. Madrasah yang berhasil meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan adalah madrasah yang menjadikan data pemetaan mutu sebagai panduan nyata dalam setiap keputusan pengembangan kelembagaan, mulai dari penyusunan anggaran hingga pembinaan guru. Konsistensi ini yang membedakan antara madrasah yang betul-betul bermutu dengan madrasah yang hanya tampak bermutu di atas kertas.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan pokok yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pertama, pelaksanaan pemetaan mutu di madrasah dalam lingkup Kanwil Kemenag Jawa Timur sudah memiliki alur prosedural yang sistematis melalui mekanisme SPMP, namun implementasinya di lapangan masih sangat bervariasi dan belum merata antar kabupaten/kota. Madrasah yang menjalankan pemetaan secara substantif masih jauh lebih sedikit dibandingkan yang menjalankannya secara formalitas administratif.

Kedua, kendala yang dihadapi bersifat multidimensi dan saling berkaitan, mencakup keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya komitmen kepemimpinan, persoalan validitas data, minimnya tindak lanjut, serta kesenjangan akses teknologi. Kendala-kendala ini tidak bisa diselesaikan secara parsial karena akar masalahnya saling terkait satu sama lain dan membutuhkan respons kebijakan yang terpadu dari berbagai level.

Ketiga, efektivitas pemetaan mutu terhadap peningkatan kualitas madrasah terbukti bersifat kondisional. Madrasah yang secara aktif memanfaatkan hasil pemetaan menunjukkan peningkatan yang lebih nyata, sementara madrasah yang pasif tidak menunjukkan perubahan berarti. Ini membuktikan bahwa pemetaan mutu hanyalah alat, dan nilai gunanya sepenuhnya ditentukan oleh kemauan dan kemampuan pihak madrasah untuk meresponsnya secara serius.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Kanwil Kemenag Jawa Timur memperkuat fungsi pendampingan teknis pengawas madrasah dalam membantu satuan pendidikan menerjemahkan hasil rapor mutu menjadi program perbaikan yang konkret. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan tindak lanjut dari pemetaan mutu berjalan secara konsisten. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model pendampingan berbasis komunitas belajar pengawas yang dapat menjadi solusi terhadap kendala kapasitas SDM yang menjadi temuan sentral dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Diantoro, F. (2021). Pendekatan sistematis dalam perencanaan jaminan mutu pendidikan: Studi kasus di sekolah dasar. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v6i2.4282>
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, A. (2022). Peran sistem manajemen mutu dalam menciptakan madrasah unggul dan berdaya saing. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 201-215. <https://doi.org/10.58327/jmpi.v6i3.136>
- Hidayatuloh. (2022). Rencana peningkatan mutu madrasah. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 120-134.
- Huda, K. (2016). Problematika madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 16(2), 309-336. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>
- Kemenag RI. (2023). Kemenag integrasikan data mutu pendidikan dalam rapor kinerja madrasah digital. <https://kemenag.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 3(1), 1-14.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara.
- Prasetya, B., Hadi, S., & Sulaiman. (2022). Management of quality assurance at state vocational high schools: Multi-site study. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 54-67.
- Prayoga, A., & Risnandi, A. (2019). Implementasi manajemen mutu pendidikan di madrasah. *Al Maarief: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 2(1), 13-28.
- Rohmayanti, L. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul Yogyakarta [Skripsi]. IAIN Purwokerto.
- Rozi, F., Hermino, A., & Arifin, I. (2023). Perencanaan peningkatan mutu madrasah berbasis peta mutu. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 45-61.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Samsinar, S., & Syamsuddin, A. (2023). Implementasi manajemen mutu terpadu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di madrasah. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(2), 26-45. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v13i2.4205>
- Suardipa, I. P., & Pitriani, K. (2020). Urgensi sistem penjamin mutu dan akreditasi dalam pemetaan mutu satuan pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(1), 80-92.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjung, F. S., Harahap, H., & Lubis, M. B. (2022). Efektivitas sistem penjaminan mutu internal terhadap kinerja organisasi pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(2), 88-102. <https://doi.org/10.24114/jpains.v10i2.33856>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara.